

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin mengikat namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial. Oleh karena itu, pengetasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Presentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019.

Tabel 1.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2020

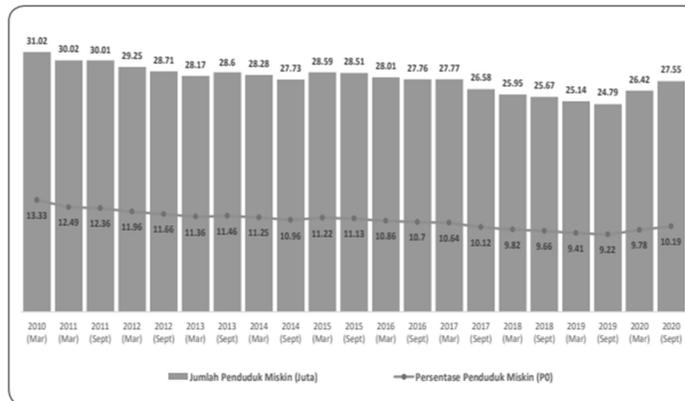
Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatra	8,80	11,34	10,22	2,306.81	3,759.37	6.066.18
Jawa	8,03	13,03	9,71	8,105.76	6,646.27	14,752.04
Bali dan Nusa Tenggara	8,99	18,18	13,92	633,96	1,482.53	2,116.49
Kalimantan	4,72	7,51	6,16	375,55	640,56	1,016.11
Sulawesi	5,59	13,45	10,41	477,07	1,584.44	2,061.51
Maluku dan Papua	5,49	28,51	20,65	139,34	1,398.02	1,537.36
Indonesia	7,88	13,2	10,19	12,038.50	15,511.19	27,549.69

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), September 2020

Secara umum, pada periode 2010 – September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan presentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan

bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai dengan September 2020 disajikan pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 2010-September 2020



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama ini kebijakan dan program pengetasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989, BUMN diwajibkan menyisihkan 1-5% dari labanya untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi. Upaya pengetasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah. Pada tahun 2002 dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keputusan Presiden RI No. 124/2001 jo Keppres RI No. 8/2002 jo Keppres RI No. 34/2002. Komite ini melibatkan berbagai actor, yaitu: akademisi, LSM, pelaku usaha, birokrasi daerah, ormas, orsospol, dan lembaga keuangan bank dan non bank. KPK dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan atas pemberdayaan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam, bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan ditengah kolapsnya moneter nasional. Karakteristik UMKM adalah beromzet relatif rendah, mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual), dan punya pangsa pasar lebih sempit. Mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bidang inilah yang perlu diisi oleh lembaga keuangan. Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat secara terus menerus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan (bi.go.id, 2015).

Selain belum memiliki akses pembiayaan perbankan untuk pelaku UMKM, sejak pandemi virus covid 19 menjadi salah satu faktor kesulitan dari pada pelaku UMKM. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh covid 19 seperti *social distancing* sehingga kebebasan setiap transaksi yang dilakukan oleh para konsumen UMKM secara mendadak berhenti di awal tahun 2019. Pertengahan bulan April masih mendapat porsi yang cukup namun memasuki Maret 2020, UMKM mengalami penurunan.

Sektor permodalan semakin menurun terutama modal lancar yang dimiliki UMKM, baik industri produksi UMKM ataupun jasa UMKM keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada masa pandemi covid 19. Beberapa hal lain yang merupakan kendala dari UMKM adalah kenaikan bahan bakar yang memicu tingginya transportasi dan kenaikan bahan baku produksi.

Sisi ekonomi UMKM semakin terdesak dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, ini dikarenakan perputaran uang pada sistem transaksi terjadi kemacetan. Sektor kredit dan usaha perbankan sama-sama mengalami penurunan. Laju pertumbuhan kredit perbankan terhadap UMKM juga mengalami penurunan, maka hal ini diperlukan pengembangan permodalan pada UMKM secara signifikan.

Kredit pembiayaan mikro untuk UMKM tanpa angunan merupakan salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk dapat menjaring para pelaku UMKM yang serius mengembangkan usahanya dan terus *survive*. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam UMKM diantaranya adalah adanya usaha yang telah dirintis atau usaha yang akan di kembangkan.

Microfinance atau pembiayaan mikro bisa menjadi alternatif untuk pada pelaku UMKM dimana pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat tiga dekade terakhir. Sejak keberhasilan program Grammen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980.

Grameen Bank merupakan pola pembiayaan yang memiliki layanan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Layanan ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah agar bisa tumbuh dan

berkembang dengan memberikan bantuan berupa pembiayaan modal dan pelatihan. Grameen Bank menysasar kelompok orang yang sebelumnya kurang terlayani seperti wanita dan berada pada garis kemiskinan. Akses ke kredit di dasarkan pada persyaratan yang wajar, seperti sistem pinjaman kelompok dan pembayaran angsuran mingguan, dengan jangka waktu pinjaman yang cukup panjang, memungkinkan masyarakat miskin untuk mengembangkan keterampilan mereka yang ada untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di setiap siklus pinjaman.

Pada pola Grameen Bank, proses pengajuan dan pemberian kredit tidak semudah membalik telapak tangan. Dimana proses tersebut harus melewati beberapa tahapan dan melibatkan beberapa pihak untuk mendapatkan keputusan kredit sehingga membutuhkan waktu yang lama dan dapat mengurangi resiko kredit macet. Contoh seorang pedagang pakaian mengajukan permohonan pinjaman lanjutan melalui ketua dalam kelompok yang kemudian akan di serahkan kepada petugas perusahaan pembiayaan lalu petugas memeriksa berkas tersebut apakah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku atau tidak? jika tidak, calon nasabah diminta untuk melengkapi dokumen.

Selanjutnya petugas akan melihat riwayat kedisiplinan pembayaran dan kehadiran serta karakter nasabah tersebut yang sangat menentukan apakah data tersebut bisa diproses ke tahap uji kelayakan. Jika data tersebut tidak bermasalah maka akan dilakukan tahap uji kelayakan mengenai identitas dan kondisi usaha. Dari hasil uji kelayakan inilah waktu yang relatif lama untuk menganalisa, menentukan, dan memutuskan apakah nasabah ini menjadi prioritas penerima kredit pembiayaan mikro atau tidak.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan solusi dari fenomena masalah di atas dengan pendekatan komputasi khususnya untuk penentuan **Prioritas Nasabah Penerima Pembiayaan pada Kredit Mikro** dengan menggunakan metode SAW.

Pendekatan *Simple Additive Weighting* (SAW) diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam menentukan prioritas nasabah yang layak diberikan kredit pembiayaan mikro. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi yang artinya telah melewati proses normalisasi sebelumnya. (Sugiyanto, 2013)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan

proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi MADM (Multiple Attribute Decision Making). (Daihani, 2015).

B. Permasalahan

Banyaknya nasabah yang ingin mengajukan kredit pembiayaan kembali untuk tambahan modal usaha, membuat perusahaan pembiayaan mengalami permasalahan untuk menentukan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro. Kurang tepatnya perusahaan pembiayaan dalam penyaluran dana, dimana nasabah yang memiliki disiplin pembayaran dan kehadiran kurang namun memiliki potensi kemampuan bayar yang cukup sering kali tidak menjadi prioritas dan kurang efektifnya dalam menentukan prioritas nasabah yang membutuhkan waktu cukup lama dalam mengambil keputusan.

Berikut pada table 1.2 adalah data hasil uji kelayakan perusahaan terhadap nasabah yang ingin mengajukan kembali pembiayaan dimana data tersebut merupakan data sample nasabah yang ada.

Tabel 1.2 Data Uji Kelayakan Nasabah

No	Nama	Kehadiran	Pembayaran	Point Kondisi Rumah	Pendapatan Bersih	Pengajuan Plafond	Kemampuan Bayar	Nilai
1	Wati	1-5x tidak hadir	100% bayar	4	333.333	5.000.000	37,50%	Bukan Prioritas
2	Tuti	100% hadir	100% bayar	9	625.500	3.500.000	11,66%	Prioritas
3	Rosani	100% hadir	100% bayar	9	700.000	3.000.000	10,71%	Prioritas
4	Firda Maulidia	100% hadir	100% bayar	8	333.333	4.000.000	30,00%	Prioritas
5	Siti Nurhayati	100% hadir	1x TR	7	500.000	5.000.000	25,00%	Bukan Prioritas
6	Elanda Frasista	100% hadir	100% bayar	4	483.333	4.000.000	20,68%	Prioritas
7	Kasuma Upik	1-5x tidak hadir	1x TR	5	750.000	4.000.000	13,33%	Bukan Prioritas
8	Mistina	1-5x tidak hadir	2x TR	7	266.000	5.000.000	46,99%	Bukan Prioritas
9	Turyati	100% hadir	100% bayar	9	175.000	3.000.000	42,85%	Prioritas
10	Sulpiana	1-5x tidak hadir	1x TR	2	650.000	4.000.000	15,38%	Bukan Prioritas

Sumber : Data Uji Kelayakan Nasabah Lanjutan Kredit Mikro

Berdasarkan table di atas, nasabah kredit mikro secara keseluruhan telah mendapatkan pembiayaan, pada proses yang berjalan saat ini untuk penentuan Prioritas Nasabah Penerima Pembiayaan pada Kredit Mikro masih dilakukan dengan manual dengan cara uji kelayakan lapangan yang mana proses tersebut masih belum akurat karena hanya berdasarkan nilai masing-masing kriteria nasabah.

Proses penentuan Prioritas Nasabah Penerima Pembiayaan yang tidak memiliki bobot penilaian menjadikan penilaian kurang tepat. Seperti yang terdapat pada table 1.2

dimana nasabah Wati dan Siti Nurhayati tidak menjadi nasabah prioritas penerima pembiayaan dikarenakan memiliki nilai kehadiran dan pembayaran tidak 100%. Namun jika dilihat dari kriteria kemampuan bayar Wati dan Siti Nurhayati masih bisa menjadi prioritas karena nilai kemampuan bayarnya masih dibawah angka 50% bahkan berada di atas nilai Turyati yang nilai kemampuan bayarnya sudah hampir mendekati 50% meskipun nilai kehadiran dan pembayarannya 100%.

Penentuan prioritas nasabah yang harus di pertimbangkan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang menerapkan pola Grameen Bank biasanya akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas nasabah penerima pembiayaan. Sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan dan mengelola data yang akan digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Sehingga diperlukan sebuah Metode untuk menentukan dan melakukan perbandingan hasil nilai kriteria prioritas nasabah penerima pembiayaan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, didapatkan identifikasi masalah yaitu :

- a. Belum tepatnya pihak perusahaan pembiayaan mikro dalam menentukan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro.
- b. Belum efektif dalam proses penentuan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro.

2. Pernyataan Masalah (Problem Statement)

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan pernyataan masalah yaitu kurang tepat dan tidak efektif dalam penentuan prioritas nasabah penerima pembiayaan pada kredit mikro.

3. Pertanyaan Penelitian (Research Question)

Berdasarkan pernyataan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan prioritas nasabah yang menerima pembiayaan kredit mikro?
- b. Seberapa tepat dan efektif penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam menentukan prioritas nasabah yang menerima pembiayaan kredit mikro?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas nasabah yang menerima kredit pembiayaan mikro.

2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendapatkan hasil analisa yang tepat dalam menentukan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro.
- b. Memperoleh proses penentuan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro yang lebih efektif.
- c. Mengembangkan *prototype* aplikasi pembuat keputusan dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro.
- d. Mengukur tingkat keefektifan dan ketepatan penentuan prioritas nasabah penerima kredit pembiayaan mikro yang lebih efektif.

D. Spesifikasi Produk yang di harapkan

Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya produk berupa proses dan pengembangan sistem untuk sistem informasi penentuan prioritas nasabah yang menerima kredit pembiayaan mikro dengan spesifikasi :

1. Pengambilan Keputusan secara tepat, efektif dan efisien dengan Penerapan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) untuk menentukan prioritas nasabah yang menerima pembiayaan kredit mikro.
2. Performa aplikasi yang responsive.
3. Desain antarmuka yang interaktif dan user friendly.
4. Pengoprasian dilakukan pada web browser.

E. Signifikansi penelitian

Signifikansi dilakukannya penelitian dan pengembangan untuk dapat menemukan teknik komputasi penerapan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas nasabah yang menerima kredit pembiayaan mikro.

Dengan adanya penelitian ada beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan penerapan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) pada sistem pendukung keputusan dalam menentukan prioritas nasabah yang menerima kredit pembiayaan mikro.
2. Manfaat praktis, memberikan kemudahan pada perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penentuan prioritas nasabah yang menerima kredit pembiayaan mikro.
3. Manfaat kebijakan, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan perusahaan pembiayaan.

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

1. Asumsi

Penelitian ini bisa berjalan dengan menggunakan kriteria yang saat ini berlaku, namun bila di kemudian hari ada kebijakan baru maka kriteria yang digunakan menyesuaikan kebijakan terbaru.

2. Keterbatasan Pengembangan

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem yang dikembangkan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

- a. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) hanya digunakan untuk pemeringkatan dan mengurutkan nasabah prioritas dari kriteria dan alternatif yang sudah ada.
- b. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) memiliki kekurangan yaitu hanya dapat melakukan pemeringkatan tanpa bisa melakukan perhitungan lainnya.
- c. Sistem yang dibangun berupa prototype yang hanya bisa diakses melalui web browser.

G. Definisi Istilah Dan Definisi Operasional

1. Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.
2. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.
3. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu
4. Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha.
5. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan.
6. Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil dan kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*.